

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Saat ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan peran serta kontribusi nyata dari bank. Bank dianggap sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hal penciptaan dan peredaran uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat menyimpan uang, melakukan pembayaran ataupun penagihan, melakukan pengiriman uang dan juga kegiatan keuangan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan bank dikatakan sebagai lembaga atau agen pembangunan (*agent of development*) dalam suatu negara.

Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta merupakan lembaga yang berfungsi

memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Di samping itu, bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Di era globalisasi saat ini, bank menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks. Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank tersebut bersifat internal dan eksternal. Tantangan dari internal bank berasal dari pihak manajemen bank itu sendiri. Permasalahan *internal control*, *human resource management*, praktik tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko perbankan merupakan masalah internal yang sering dihadapi, sedangkan tantangan eksternal bank dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara tempat bank tersebut beroperasi. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang menjadi induk dari bank asing yang beroperasi di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank.¹

Terkait adanya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank, maka perlu dilaksanakan penilaian terkait dengan kinerja bank di Indonesia. Penilaian ini dimaksudkan agar bank-bank umum di Indonesia dapat bertahan dalam menghadapi tantangan dan risiko tersebut, oleh karena itu setiap bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menerbitkan laporan keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral, menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak). Menurut Almilia (2007), laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber

¹ Ika Permatasari dan Retno Novitasary, "Pengaruh Impelemntasi *Good Coporate Governance* Terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indoensia: Manajemen Resiko Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 7 No.1, 2014, p. 52-59.

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.²

. Kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan seberapa besar tingkat profitabilitas yang dihasilkan atau dengan melihat tingginya harga saham perusahaan tersebut. Harga saham yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Untuk mencapai tujuan dan kinerja bank yang baik tidak terlepas dari tindakan manajemen itu sendiri.

Hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *agency theory*. Hubungan agensi muncul ketika pemilik saham (*principal*) memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Dalam teori agensi diungkapkan bahwa ada ketidakselarasan atau *assymetric information* antara *principal* dan *agent*. Dalam posisi ini manajer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan *principal* sehingga menimbulkan asumsi bahwa individu-individu tersebut bertindak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri (*moral hazard*). Untuk mengatasi permasalahan *agency* ini, pihak perbankan perlu melakukan sebuah perbaikan pada sistem tata kelolanya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah keagenan yang berdampak pada kinerja perusahaan, yakni dengan sistem pengelolaan

² Luciana Spica Almilia, "Prediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan *Go Public* Dengan Menggunakan Analisis Multinomial Logit". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII No. 1, Maret 2006, p. 7.

operasional bank secara professional dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu metode yang harus diterapkan oleh perusahaan di Indonesia khususnya sektor perbankan guna meningkatkan kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* menciptakan struktur yang membantu bank dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan operasional bank.³

Menurut Ferry (2008), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di industri perbankan dideskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan pemegang saham. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan diantara elemen dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik *monitoring* kinerja.⁴ Hal ini sesuai dengan tujuan dari penerapan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan perbankan yang sehat.

³ Ferry, N. "Peranan *Good Corporate Governance* dalam Industri Perbankan Indonesia, Jakarta: Makalah Bank dan Manajemen, No. 55 Vol. 2, 2008, p.245

⁴ Darmawati, dkk., "Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan", Dalam Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar-Bali. 2004.

Pieris dan Wiryawan (2008), mengemukakan bahwa prinsip dasar *corporate governance* meliputi aspek yaitu akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparancy*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dan kemandirian (*Independency*).⁵ Menurut *Nation Committee For Corporate Governance* (NCGG), kriteria kerangka kerja *good corporate governance* salah satunya adalah dewan direksi. Indonesia menganut sistem *dual-board system* artinya terdapat pemisahan kepentingan antara dewan direksi dan dewan komisaris. Komposisi dewan direksi harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, jumlah dewan direksi yang banyak akan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena akan menambah *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Jumlah direksi yang banyak akan membuat kinerja lebih baik karena jumlah sumber daya yang banyak sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan cepat.⁶ Aspek penting lain dari *corporate governance* adalah komisaris independen, Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* (KNKCG). Komisaris menurut kode tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi, dan memberikan nasehat bilamana diperlukan. Komposisi komisaris haruslah

⁵ John Pieris dan Nizam Jim Wiryawan, "Etika Bisnis dan *Good Corporate Governance*", Edisi kedua, Penerbit : Pelangi Cendikia, Jakarta. 2008, p. 131.

⁶ Bambang Listyo Purno, "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan", Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2013, p.11

sedemikian rupa guna mencapai pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, setidaknya 50% dari anggota komisaris harus merupakan komisaris independen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangan-pertimbangan komisaris. Jensen dan Meckling mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost* dan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam struktur permodalan di Indonesia, kepemilikan saham manajerial dapat berasal dari anggota dewan direksi ataupun dari anggota dewan komisaris. Kepemilikan saham direksi dan komisaris yang tinggi dimana direksi mendapatkan *control* yang efektif terhadap perusahaan memiliki hubungan dengan nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan. Peningkatan proporsi saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer sekaligus sebagai pemegang saham. Manajer tidak akan sepenuhnya bertindak demi kepentingan diri sendiri karena dalam hal ini manajer juga sebagai pemegang saham dari perusahaan. Hal ini membuat manajer akan lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga

kinerja keuangan perusahaan meningkat bersamaan dengan semakin meningkatnya kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan.⁷

Untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, perusahaan dapat mengimplementasikan tiga cara, salah satunya adalah manajer menerapkan *Coporate Social Responsibility (CSR)* serta mengungkapkannya ke publik.⁸ CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, tapi tanggung jawab perusahaan saai ini harus berpijak pada konsep *triple bottom lines* yaitu *Profit, People and Planet (3P)*.⁹

Menurut Abriani (2012), *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah alat yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari konflik antara perusahaan dengan lingkungannya¹⁰. Penerapan CSR penting guna mencegah terjadinya kerugian sosial dan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan. Menurut Indrawati (2009), CSR juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena dengan perusahaan menerapkan CSR maka dapat membantu perusahaan untuk mencegah timbulnya biaya

⁷ Yeterina Widi Nugrahanti dan Shella Novia, "Pengaruh Struktur Kepemilikan sebagai Mekanisme *Corporate Governace* Terhadap Kinerja Perusahaan", *Jurnal Manajemen*, Vol.11, No.2, 2012, p.8.

⁸ Ni Nyoman G Martini Putu, dkk., "*Factors Affecting Firm Value of Indonesia Public Manufacturing Firm*", *International Journal of Business and Management Invention*, Volume 3, 2014, p.35-44 .

⁹ Badjuri, "Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Good Corporate Governance, Pngungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2011.

¹⁰ Abriani, Destya Ramia, Sudarso Kaderi Wiryono, and Erman Sumirat.. *The Effect of Good Corporate Governance And Financial Performance On The Corporate Social Responsibility Disclosure Of Telecommunication Company In Indonesia. The Indonesian Journal of Business Administration* Vol. 1, No. 5, 2012: 296-300.

eksternal, sehingga kinerja keuangan akhir tahun perusahaan akan dinilai positif oleh pihak internal dan eksternal perusahaan.¹¹ Menurut Kusumadilaga *Corporate Social Responsibility* bukanlah hanya sekadar biaya (*cost*), tetapi juga merupakan investasi bagi perusahaan karena dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini perusahaan selain mendapatkan *image* yang bagus di mata konsumen dan investor, dengan program ini perusahaan dapat meningkatkan jumlah penjualannya yang berdampak pada profitabilitas perusahaan yang tinggi.

Kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan sektor perbankan. Perbedaan pada penelitian ini yakni peneliti menambahkan variabel *corporate social responsibility* dan kinerja perusahaan diprosikan dengan *Tobin's Q* dengan ukuran perusahaan dan kesempatan tumbuh sebagai variabel kontrol. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Kepemilikan Menejerial dan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

¹¹ Indrawati, “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam *Annual Report* Serta Pengaruh *Political Visibility* Dan *Economic Performance*”. *Pekbis Jurnal*, Vol.1, 2009, p 1-11.

1. Apakah ukuran dewan direksi dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
2. Apakah proporsi komisaris independen dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
3. Apakah kepemilikan saham manajerial dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
4. Apakah *corporate social responsibility* dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
5. Apakah ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor seperti ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan.

2. Bagi perbankan

Memberikan masukan, saran atau pertimbangan kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan saham manajerial dan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan khususnya perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembantu maupun referensi dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di pasar modal.